



AGENDA-SETTING PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH : ANALISIS DINAMIKA MUSRENBANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Maudi Tri Wahyuni, Rizki Hegia Sampurna, M.Rijal Amirulloh

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda-setting dalam penentuan prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sukabumi Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seleksi isu dan penetapan program prioritas pembangunan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber serta teknik, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan teori Multiple Streams Framework yang meliputi problem stream, policy stream, dan politics stream. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan agenda pembangunan telah melalui identifikasi permasalahan daerah, penyusunan alternatif kebijakan, dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat serta daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara usulan masyarakat dengan program prioritas yang ditetapkan karena keterbatasan fiskal, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, serta proses seleksi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan partisipatif akan meningkat apabila ketiga arus dalam Multiple Streams Framework terintegrasi secara seimbang sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi dalam penetapan prioritas pembangunan daerah.

Kata Kunci: agenda-setting, Musrenbang, prioritas pembangunan daerah, Multiple Streams Framework.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan

*Correspondence Address : mauditriwahyuni2556@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i8.2026. 2141-2146

© 2026UM-Tapsel Press

berkelanjutan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Melalui Musrenbang, aspirasi masyarakat diharapkan dapat diakomodasi ke dalam kebijakan sehingga program pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Dalam perspektif kebijakan publik, Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai proses *agenda-setting*, yaitu tahap awal dalam menentukan isu-isu yang layak menjadi agenda kebijakan pemerintah (Dunn, 2017). Tidak semua usulan masyarakat dapat ditetapkan sebagai prioritas pembangunan karena harus melalui proses seleksi berdasarkan tingkat urgensi, kemampuan fiskal daerah, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, proses *agenda-setting* menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kota Sukabumi melaksanakan Musrenbang sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Masyarakat diberikan kesempatan mengusulkan program pembangunan melalui rembug warga di tingkat kelurahan yang selanjutnya dibahas secara berjenjang hingga tingkat kota. Namun, hasil sinkronisasi menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan program prioritas pemerintah. Dari 338 usulan masyarakat, hanya 83 usulan yang dinilai sesuai dengan RPD dan kemudian diakomodasi ke dalam 41 program prioritas pembangunan. Selain itu, usulan yang tidak terakomodasi belum disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas sehingga partisipasi

masyarakat belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap penentuan prioritas pembangunan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan agenda pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebijakan pemerintah, regulasi, serta dinamika aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Untuk menganalisis proses tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Multiple Streams Framework* dari Kingdon (1995) yang menjelaskan bahwa suatu isu dapat menjadi agenda kebijakan apabila terdapat keterkaitan antara tiga arus, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*. Ketiga arus tersebut menentukan bagaimana suatu permasalahan dikenali, dirumuskan menjadi alternatif kebijakan, dan memperoleh dukungan politik untuk ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Musrenbang masih menghadapi berbagai kendala. Sapitri (2021) menemukan bahwa proses *agenda-setting* belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antaraktor. Syamsudin et al. (2021) menjelaskan bahwa banyak usulan masyarakat tidak dapat diakomodasi akibat proses seleksi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah. Sementara itu, Hadawiya et al. (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih cenderung bersifat formalitas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan analisis pada dinamika *agenda-setting* dalam Musrenbang Kota Sukabumi Tahun 2024 menggunakan perspektif *Multiple Streams Framework* untuk menjelaskan hubungan antara aspirasi masyarakat, alternatif kebijakan, dan faktor politik dalam penetapan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses *agenda-setting* dalam Musrenbang Kota Sukabumi Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penentuan isu dan prioritas pembangunan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis proses *agenda-setting* dalam penentuan prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sukabumi Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika proses penetapan agenda kebijakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Creswell, 2016).

Subjek penelitian terdiri atas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses Musrenbang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi, Komisi I DPRD Kota Sukabumi, perwakilan kecamatan, perwakilan kelurahan, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Informan ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, peran, dan keterlibatan mereka dalam proses penyusunan prioritas pembangunan (Sugiyono, 2019).

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026, dokumen Musrenbang, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2013), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga dimensi dalam **Multiple Streams Framework** yang dikemukakan oleh Kingdon (1995), yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*, untuk menjelaskan bagaimana isu pembangunan diseleksi dan ditetapkan menjadi prioritas pembangunan daerah melalui Musrenbang Kota Sukabumi Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sukabumi Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan identifikasi permasalahan pembangunan, penyusunan alternatif kebijakan, serta penyesuaian dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026. Penetapan prioritas pembangunan tidak hanya mempertimbangkan usulan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kemampuan fiskal daerah, regulasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Tabel 1. Sinkronisasi Usulan Masyarakat dengan Program Prioritas Pembangunan

Uraian	Jumlah
Usulan masyarakat melalui musrenbang	338
Usulan yang terakomodasi	83
Program prioritas yang ditetapkan	41

Sumber: Laporan musrenbang Kelurahan, Laporan Musrenbang Kecamatan, Dokumen RPD Kota Sukabumi 2024-2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi menjadi program prioritas pembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya proses seleksi agenda sebelum suatu usulan ditetapkan menjadi kebijakan daerah.

Musrenbang Kecamatan, usulan-usulan yang diajukan oleh masing-masing kelurahan diseleksi berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024–2026. Hasil proses tersebut menghasilkan sejumlah usulan prioritas pembangunan yang dianggap paling relevan dan strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, usulan yang terdapat dalam mind map merupakan representasi dari agenda prioritas pembangunan yang telah mengalami proses penyaringan dan penetapan prioritas pada tingkat kecamatan.

Analisis menggunakan **Multiple Streams Framework** menunjukkan bahwa proses *agenda-setting* dipengaruhi oleh tiga arus utama. Pada **problem stream**, pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, evaluasi pembangunan sebelumnya, serta isu strategis daerah. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembangunan yang perlu diprioritaskan.

Selanjutnya, pada **policy stream**, pemerintah menyusun berbagai alternatif kebijakan melalui pembahasan Musrenbang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, dokumen perencanaan, serta masukan dari perangkat daerah dan masyarakat. Namun demikian, tidak seluruh usulan masyarakat dapat diterima karena harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD, ketersediaan anggaran, serta kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspirasi publik,



Gambar 1. Rekapitulasi usulan Masyarakat di Tingkat Kelurahan

Sumber : Laporan Musrenbang Kelurahan 2024



Gambar 2. Rekapitulasi usulan Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Sumber : Laporan Musrenbang Kecamatan 2024

Gambar di atas menunjukkan hasil agregasi dan pengerucutan usulan pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kelurahan. Pada tahap

tetapi juga aspek teknis dan administratif.

Pada **politics stream**, penetapan prioritas pembangunan dipengaruhi oleh arah kebijakan nasional, regulasi pemerintah, serta proses koordinasi antarperangkat daerah. Faktor tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, keputusan akhir mengenai program prioritas merupakan hasil interaksi antara kebutuhan masyarakat, alternatif kebijakan yang tersedia, dan pertimbangan politik dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang telah berfungsi sebagai forum partisipatif dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Akan tetapi, partisipasi tersebut belum sepenuhnya menentukan hasil akhir penetapan prioritas pembangunan karena adanya mekanisme seleksi yang mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa proses Musrenbang masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat akibat keterbatasan anggaran, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, dan koordinasi antaraktor kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas proses *agenda-setting* akan meningkat apabila terdapat sinkronisasi yang lebih kuat antara **problem stream**, **policy stream**, dan **politics stream**. Integrasi ketiga arus tersebut memungkinkan aspirasi masyarakat memperoleh peluang yang lebih besar untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, sehingga prioritas pembangunan yang ditetapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

sekaligus tetap selaras dengan arah pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses *agenda-setting* dalam penentuan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sukabumi Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif kebijakan, dan penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat karena setiap usulan harus melalui mekanisme seleksi yang mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah, kemampuan fiskal, serta kewenangan pemerintah daerah. Analisis menggunakan *Multiple Streams Framework* menunjukkan bahwa penetapan prioritas pembangunan dipengaruhi oleh keterkaitan antara *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan perpaduan antara kebutuhan masyarakat, alternatif kebijakan yang tersedia, dan pertimbangan politik dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, efektivitas Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan partisipatif dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dalam proses seleksi usulan, serta penyelarasan yang lebih baik antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah agar prioritas yang ditetapkan semakin responsif terhadap kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (E. Soetari, Ed.; edisi ke-2). CV. PUSTAKA SETIA.
- Baumgartner, F.R., & Jones, B.D. (1993). *Agendas and instability in American politics* (Benjamin, Ed.). University of Chicago Press.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1983). *PARTICIPATION IN AMERICAN POLITICS* (J. Hopkins, Ed.; Edisi Ke-2). Congres Cataloging in Publication Data.
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routlege.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Jenar, S., Churniawan, E., Tarmizi, R., Kosasih, A., Suhariyanto, D., Sudjati, X. Q. D., Andriani Mei, Dadi, agustinus F. P., Suwandoko, Cahyandari, D., Nababan, K. R., Gustaliza, R. B., Quraisyta, N. F., Sembiring, G. A., & Fazriyah, lailatul. (2024). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (M. R. Kurnia, Ed.). PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Kingdon, J. W. (1995). *AGENDAS, ALTERNATIVES AND PUBLIC POLICIES* (L. A. Wiegman, Ed.; Edisi ke-2). HarperCollins College Publishers.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (Moh. Nizar, Ed.). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative data analysis*.
- Nuddin, Ibrahim, & Tamrin, U. (2024). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH* (R. P. Murtikusuma, Ed.; Edisi Ke-1). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Nugroho, R. (n.d.). *Public Policy*. ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
- Priatna, I. A., Widada, R., The, H. Y., Fitriani, Atmaja, U., Amelia, S., Guswandi, Wibowo, T., Prayugo, A., Ahmad, D., Djumaty, B. L., & Hayam Dey, N. P. (2025). *PEMBANGUNAN DAERAH* (E. Damayanti, Ed.; Edisi Pertama). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Sidiq, F. F. (2025). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH* (nofendy Ardianto, Ed.; Edisi Ke-1). CV. ALINEA EDUMEDIA.
- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., Maulana, M. A., Elvianti, Syarkawi, Nurfaisal, M. D., & Windra, P. (2025). *KEBIJAKAN PUBLIK* (R. K. Pratama, Ed.; Edisi Ke-1). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF* (Sutopo, Ed.). CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Wahyudi, H. (2025). *DASAR-DASAR TEORI ADMINISTRASI NEGARA* (F. Setyawan, Ed.). Madani Kreatif Publisher.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (n.d.). www.peraturan.go.id
- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. (2023).
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Diterima: 11 Juli, 3(2), 192200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Sapitri, D. (2021). *AGENDA SETTING DALAM PROSES KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA KOTA KAPUR SEBAGAI DESTINASI WISATA SEJARAH*. 1(2). <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech>
- Syamsudin, M., Oevank Oeray Nomor, J., & Kota Sintang, B. (2021). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN*.